

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Peran

a. Pengertian Peran

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya

¹ Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1999), hlm. 735

bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.²

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.³ Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.⁴

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

b. Pengertian Peranan Sosial

Peranan sosial memiliki maksud bahwa peranan yang terdiri atas pola kelakuan lahiriah dan pola kelakuan batiniah yang diterima dan

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 212-213

³ <http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 25 Juni 2021

⁴ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 7

diikuti banyak orang. Yang ditekankan dalam peranan sosial adalah kewajiban dan tanggungjawab. Istilah lainnya adalah jabatan atau tugas yang diserahkan kepada seseorang ataupun institusi sosial oleh instansi yang berwenang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵

Paul dan Robert Horton menyebutkan dua peranan sosial, kedua hal dimaksud yaitu peranan bawaan (*Ascribed Roles*) dan peranan pilihan (*Achieved Roles*) muncul secara bersamaan. Itulah yang disebut dengan struktur yang bersifat korelatif, di mana ada status di situ ada peranan. Peranan bawaan muncul dari status bawaan, peranan pilihan muncul dari status pilihan.

1. Peran bawaan adalah tanda yang diberikan sesuai dengan kelahiran atau faktor lainnya yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Misalnya, umur, jenis kelamin, dan ras adalah anggapan dasar pada umumnya.
2. Peran pilihan adalah sesuatu yang di peroleh melalui pilihan atau tindakan sendiri. Contoh di dalam masyarakat termasuk status pekerjaan dan perkawinan. Biasanya bawaan status kelas sosial dari orang tua, tetapi dalam masyarakat adalah mungkin untuk memilih (pilihan) meraih status kelas yang berbeda melalui tingkah lakunya (tindakan).⁶

⁵ Hendropuspito, *Sosiologi Sistematis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 185.

⁶ Ibid.

Selain kedua jenis peranan sosial yang disebutkan di atas, Hendropuspito dalam bukunya sosiologi sistematis menambahkan empat peranan sosial yang ada dalam masyarakat yang dapat diklasifikasikan dengan berbagai macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang yang diambil. Diantaranya;

1. Peranan yang diharapkan (*Expected Roles*) dan Peranan yang disesuaikan (*Actual Roles*).

Setiap individu dalam masyarakat pasti mendambakan peran yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga semua kepentingan bersama dalam masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Yang termasuk dalam jenis peranan ini adalah hakim, protokoler diplomatik. Terdapat juga peranan yang pelaksanaannya lebih luwes, namun kadang-kadang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu dan hal itu, kadang dianggap wajar oleh masyarakat setempat. Itulah yang disebut dengan peranan yang disesuaikan.⁷

2. Peranan Kunci (*Key Roles*) dan Peranan Tambahan (*Supplementary Roles*).

Peranan kunci muncul dari kedudukan (status) kunci. Seseorang yang menempati kedudukan utama akan memainkan peranan utama. Dalam bahasa populis status kunci sering dikatakan

⁷ Ibid., hlm.190

kedudukan penting, peranan kunci dikatakan peranan penting atau tugas penting. Namun tidak selamanya kedudukan penting selalu status kunci, demikian pula tugas penting tidak selalu sama dengan status kunci. Yang dimaksud dengan kedudukan kunci adalah kedudukan yang dominan sehingga kedudukan yang lain harus mengalah terhadapnya. Berbeda halnya dengan peranan tambahan dimana peran ini tidak muncul dari kedudukan (status) kunci. Peranan tambahan tidak dijadikan faktor terpenting untuk mengembangkan kepribadian pemegang peran itu, melainkan hanya untuk menambah pengalamannya.

3. Peranan Golongan dan Peranan Bagian.

Masyarakat terdiri dari macam-macam kelompok dan tiap-tiap kelompok merupakan stasiun dari kedudukan yang setingkat serta peranan yang sejenis. Melalui kelompok-kelompok tersebut warga masyarakat memainkan peranan sosialnya yang berbeda-beda agar dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Misalnya peranan dalam kelompok pendidikan, kelompok ekonomi, kelompok politik, kelompok keagamaan, kelompok hiburan dan lain-lain.

4. Peranan Tinggi, Peranan Menengah dan Peranan Rendah.

Setiap peranan sosial berasal langsung dari status sosial, maka peranan tinggi, menengah, rendah, bergantung pada tinggi rendahnya status sosial yang ditempati seseorang atau golongan. Hendropuspito mengatakan bahwa tinggi rendahnya status sosial

ditentukan oleh dua faktor yaitu; sistem nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan dan keberhasilan seseorang dalam menunaikan peran.⁸

c. Konsep Peran Organisasi Publik

Menurut Mahsun sektor publik dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang dan jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Jadi, munculnya sektor publik berawal dari adanya kebutuhan masyarakat secara bersamaan terhadap barang atau layanan tertentu. Agar tercapai prinsip keadilan dalam hal pengalokasian dan pendistribusian barang dan layanan umum, maka dipilih sekelompok masyarakat sebagai pengelola, yang salah satunya kini dikenal dengan sebutan pemerintah. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Organisasi yang tergolong sebagai organisasi sektor publik di Indonesia mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejumlah perusahaan yang bersahamkan pemerintah (BUMN, BUMD), organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi-organisasi massa.

⁸ Ibid., hlm. 191

Sebagai lembaga pengelola barang publik dan penyedia pelayanan, menurut Jones dalam Mahsun organisasi sektor publik memiliki empat peran utama yaitu:

1. *Regulatory role*, regulasi-regulasi sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara bersama-sama bisa mengonsumsi dan menggunakan *public goods*. Sektor publik sangat berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa ada aturan oleh organisasi-organisasi di lingkungan sektor publik maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. Sebagian masyarakat pasti akan dirugikan karena tidak mampu memperoleh barang atau layanan yang sebetulnya untuk umum.
2. *Enabling role*, tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkannya segala aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib dan lancar. Sektor publik mempunyai peran yang cukup besar dalam memperlancar aktivitas masyarakat yang beraneka ragam tersebut. Wujud peran ini antara lain; Dinas Ketertiban mengatur pedagang kaki lima agar memungkinkan jalan raya tidak macet. Kantor Pemadam Kebakaran menanggulangi musibah kebakaran agar tidak menimbulkan banyak kerugian.
3. *Direct provision of goods and service*, semakin kompleks dan meluasnya area sektor publik maka sebagian sektor publik mulai dilakukan privatisasi. Privatisasi mengharuskan sektor publik masuk dalam mekanisme pasar. Sektor Publik berperan dalam mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang atau jasa, *public good* dan *quasi public goods*. Peran sektor publik dalam hal ini adalah ikut serta mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik.
4. Penyedia Layanan (*Service Provider*) Peran pemerintah sebagai penyedia layanan dalam pengelolaan sampah yaitu sebagai upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan proses pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah, pemerintah juga melakukan andil dengan menunjukkan kesiapannya memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan juga turut dalam mengembangkan hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah.⁹

⁹ M. Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE, 2009, hlm.8

Jika dilihat dari definisi dan peran sektor publik tersebut diatas, maka dengan kata lain sektor publik adalah *government* (pemerintah) yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, dimana pemerintah diberi 'kekuasaan' oleh masyarakat untuk mengatur dan menjamin pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang berlandaskan hukum.

d. Dimensi Peran

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan.

Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

2. Peran sebagai strategi.

Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

3. Peran sebagai alat komunikasi.

Peran di dayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.¹⁰

2. Konsep Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya dan mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan kehidupan ekologi tersebut.

Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli, sebagai berikut: Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang

¹⁰ Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, (Jakarta :Walhi, 2003), hlm 67

dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia.¹¹

Pengertian lingkungan menurut Otto Soemarwoto tentang lingkungan hidup ialah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersamadengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik menempati ruang tertentu.¹² Pengertian lingkungan hidup menurut Sambah Wirakusumah adalah lingkungan hidup adalah semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu.¹³ Menurut Emil Salim lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.¹⁴ Sedangkan menurut Soedjono lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani.¹⁵

¹¹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, (Bandung: Binacipta, 2001), hlm 83

¹² Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 1.

¹³ <http://www.sridianti.com/pengertianlingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 3 April 2021

¹⁴ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Djembatan, 2001), Hlm. 19

¹⁵ Sridianti, *"Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli"*, dikutip dari laman webside: ww.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html, diakses pada mei 2021

Pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan umum serta makhluk hidup lain.¹⁶ Berdasarkan pengertian diatas, pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

b. Penanggulangan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penanggulangan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Pasal 53 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran maupun perusakan lingkungan wajib menanggulangi efek dari pencemaran dan perusakan lingkungan. Penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, penghentian sumber pencemaran dan

¹⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm.45

perusakan lingkungan, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁷

c. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Sesuai Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok
 - a) Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Fungsi
 - a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Pengembangan penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. Pemberian rekomendasi bidang lingkungan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan sampah

¹⁷ Ibid., hlm.65

g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.¹⁸

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata daya yang berarti upaya, usaha, akal, dan kemampuan.¹⁹ Pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi yaitu: pertama, penyadaran tentang peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang ditimbulkan serta kesulitan hidup atau penderitaan. Kedua, meningkatkan sumber daya yang telah ditemukan. Pemberdayaan memerlukan upaya advokasi kebijakan ekonomi politik yang pada pokoknya bertujuan untuk membuka akses golongan bawah, lemah, dan tertindas tersebut terhadap sumber daya uang yang dikuasai oleh golongan kuat, atau yang terkungkung oleh peraturan pemerintah dan pranata sosial.²⁰

Pemberdayaan terkenal dengan istilah empowerment yang mempunyai kata dasar yaitu daya (power). daya merupakan potensi, sumber daya yang dimiliki seseorang supaya dirinya mampu membela dan mengembangkan diri sendiri. Sementara Shardlow mengatakan pada intinya : pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka

¹⁸ <https://dlh.tulungagung.go.id/> diakses Mei 2021

¹⁹ Badadu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), hlm. 317

²⁰ M. Dewam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 355

sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.²¹

b. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kartasasmita, pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasi potensi-potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain menjadikan masyarakat mampu dan mandiri dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya, menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan tanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan.²²

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan

²¹ Mustofa Kamil, http://file.upi.edu/Direktori/Fip/Jur.Pend.Luar_Sekolah/196111091987031001-Mustofa_Kamil/Pengertian_Pemberdayaan.pdf, diakses April 2021

²² Sulistiati, *Isu-isu Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Balai Latihan dan Pengembangan Depsos RI, 2004), hlm. 229.

demi tercapainya tujuan. Dalam Islam, strategi pemberdayaan berarti mengembangkan sistem dari umat, oleh umat dan untuk kepentingan umat.

Menurut Rubins dalam Sumaryadi pemberdayaan masyarakat memiliki 5 prinsip dasar yaitu:

1. Untuk mempertahankan eksistensinya, pemberdayaan masyarakat memerlukan break-even dalam setiap kegiatan yang dilakukan;
2. Konsep pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan;
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik termasuk didalamnya kegiatan pengembangan usaha merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;
4. Dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya (resources) khususnya dalam hal dana baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun social;
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih memfungsikann diri sebagai “katalis” yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dan kepentingan yang bersifat mikro.²³

²³ Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), hlm.97

c. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Menurut Ahmad Karim berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu maupun kelompok dalam ikatan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh pendapatan dan bagaimana pula mempergunakan pendapatan tersebut.²⁴ Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.²⁵ Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan ekonomi yaitu suatu kebutuhan masyarakat yang di nilai dengan uang atau barang yang dapat berguna untuk kebutuhan manusia yang dapat memberikan jumlah yang besar atau banyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai sumberdaya yang sangat bermanfaat.

Menurut Ginandjar Kartasasmita pemberdayaan ekonomi rakyat adalah upaya yang merupakan pengeralahan sumberdaya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga baik sumberdaya manusia maupun sumber daya alam disekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Menurut Swasono dalam Rintuh, Cornelis dan Miar mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia

²⁴ Pratiwi Mega Septiani, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga di Dusun Satu Kecubung Desa Terbanggi Lampu Tengah* dalam skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017, hlm. 3

²⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.2

sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga Langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik menurut Goulet pada dasarnya meliputi: kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.²⁶

Menurut Sumodiningrat, konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala

²⁶ Uly Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, Ainul Hayat, *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)* Vol. 2 No. 12 2 Desember 2015

pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi:
 - a. pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya
 - b. penguatan kelembagaan
 - c. penguasaan teknologi
 - d. pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah:
 - a. pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal)
 - b. memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker

- c. pelayanan pendidikan dan kesehatan
- d. penguatan industri kecil
- e. mendorong munculnya wirausaha baru
- f. pemerataan spasial

6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:

- a. peningkatan akses bantuan modal usaha
- b. peningkatan akses pengembangan SDM
- c. peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat local.²⁷

Dari enam butir pokok mengenai konsep pemberdayaan masyarakat ini, dapat disimpulkan, bahwa:

1. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja, karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara elegan tanpa

²⁷ Erni Febrina Harahap, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri*. Vol. 3 No. 2 ISSN 2086 – 5031 Mei 2012, hlm.86

menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat, untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh.

4. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien.
5. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.

d. Indikator Pemberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang berdaya atau tidak. Sehingga sebuah program pemberdayaan sosial perlu diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan.

Suatu perekonomian masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. *Pertama*, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. *Kedua*, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. *Ketiga*, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. *Keempat*, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam

mengaktualisasikan diri dan menjaga keeksistensinya bersama bangsa dan negara.²⁸

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan. Kedelapan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil; kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu): kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo).
- c. Kemampuan membeli komoditas besar; kemampuan individu untuk membeli komoditas besar; kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga; mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri

²⁸ Nur Mahmudi Isma'il, "Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul", dalam Hotmatu Daulay dan Mulyanto (ed), *Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat* (Bandung: ISTECS, 2001), hlm.28

mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk dternak, memperoleh kredit usaha.

- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik; mengetahui nama seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes; seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki posisi tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.²⁹

²⁹ <http://e-learning.unej.ac.id/mod/resource/view.php?id=30650>. Diakses tgl 23-02-2021

e. Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah

Syariat Islam merupakan ajaran yang komprehensif, mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya mengatur tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan perspektif syariah itu bertujuan untuk mencapai keseimbangan *duniawi* dan *ukhrawi*. Maka dari itu perlu adanya pemberdayaan ekonomi yang berdasarkan pada paradigma Islam.

Kualitas pemberdayaan ekonomi masyarakat ini bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, baik dari pengelolanya, badan pengawas, relawan dan masyarakatnya sendiri. Perlu adanya suasana dan lingkungan yang kondusif yang didasarkan pada pilar-pilar Islami, diantaranya adalah sebagai berikut:³⁰

a) Kesalehan Umat

Sesungguhnya kesalehan umat adalah dengan mengimani Islam sebagai akidah dan syariah, dan pengaplikasiannya dalam segala aspek kehidupan. Sebab ketika seorang muslim meyakini bahwa dia sebagai khalifah dalam kehidupan ini, yang salah satu peraturannya adalah memakmurkan bumi dan mengembangkannya, maka keyakinannya ini akan mendorongnya dalam melakukan pengembangan ekonomi dengan menilainya sebagai sarana yang harus dimiliki umat dalam melaksanakan tugasnya di dalam kehidupan ini. Bahkan jika dilakukannya dengan

³⁰ Ayumila Kurnia, Sa'diyaturrachma Insani, *Pemberdayaan Masyarakat, Perspektif Ekonomi Syariah Melalui Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)*, e-journal vol 3 no 1 ISSN: 26210622, Universitas Muhammadiyah Lampung, PPs IAIN Raden Intan Lampung, 2020 diakses journal.uml.ac.id pada 23/02/2021

ikhlas, maka akan menjadi ibadah yang mendekatkan muslim kepada Allah swt.

b) Kebaikkan Sistem Pemerintah

Adapun dimaksudkan sistem pemerintah adalah perangkat politik dan apa yang muncul darinya terkait sistem pemerintah. Sebab dengan kadar kebaikan perangkat politik, konsistensi pemahaman politik bagi individu, dan kebaikan hubungan antara rakyat dan pemerintah, maka akan meletakkan laju pesatnya pengembangan ekonomi pada jalan yang semestinya. Urgensi kebaikan sistem pemerintah bersumber pada kesadaran individu umat yang merasakan bahwa disana terdapat lembaga yang memberikan hak-haknya, menentukan kewajiban dan konsekuensi untuknya, dan memberikan peluang kepadanya dalam kehidupan. Dan itulah yang akan mewujudkan keamanan dan ketentraman, dan kepatuhan pada aturan dan ketetapan (pemerintah). Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa tugas terpenting pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Menjaga agama, yaitu dengan cara menerapkan hukum-hukumnya, menyerukan kepadanya, dan berjihad melawan musuh-musuhnya
2. Menjaga harta kaum muslimin, yaitu dengan cara mengumpulkan dan membagikannya sesuai hukum syariah.
3. Menegakkan keadilan dengan cara merealisasikan keamanan dan ketentraman.

4. Berupaya mewujudkan kesejahteraan umat dengan memeperhatikan orang-orang yang membutuhkan dan berupaya merealisasikan kecukupan mereka.³¹

c) Keadilan

Pengembangan ekonomi tidak akan berjalan dalam lingkungan yang diliputi kezaliman; karena kezaliman merupakan sebab hilangnya nikmat dan datangnya adzab; kemudian bahwa umat yang kehilangan keadilan maka akan kehilangan keadilan untuk bekerja sama dalam pengembangan. Umar *Radiyallahu Anhu* menjelaskan dampak kezaliman terhadap kehidupan dengan mengatakan, ”Tertahannya hujan disebabkan hakim yang jahat dan pemimpin yang zalim”.³²

d) Kebebasan dan Persamaan

Pembicaraan tentang kebebasan dan persamaan bukanlah hanya sebatas teori dan konsep belaka, namun pembicaraan tentang hal yang dinamis, menyentuh relung kehidupan individu dan kelompok, serta berdampak pada perjalanan umat dalam kemajuan atau ketertinggalannya. Pembicaraan tentang kebebasan dan persamaan dalam Islam sangat berbeda dengan yang terdapat dalam sistem konvensional. Dalam Islam, persamaan merupakan substansi keadilan, persamaan merupakan buah dari keadilan dan salah satu fenomenanya. Sebab keadilan mengharuskan

³¹ Ibid.

³² Ibid.

persamaan diantara manusia dalam segala bidang, seperti disebutkan dalam firman Allah,

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu.” (Al- Hujurat: 13)

e) Keamanan dan Ketentraman

Alquran mensejajarkan antara nikmat kemakmuran dan nikmat keamanan dan ketentraman. Allah berfirman,

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (Quraisy: 3-4)

Para pengamat dalam era kontemporer mengetahui hubungan antara keamanan dan pengembangan ekonomi, dimana mereka mengaitkan konsep pengembangan ekonomi dengan keamanan, hingga dikatakan, “Keamanan adalah pengembangan ekonomi. Tanpa pengembangan ekonomi, maka disana tidak mungkin ada keamanan. Karena itu negara-negara berkembang yang “tertinggal” yang tidak merealisasikan pengembangan ekonomi tidak merasakan adanya jaminan

Seperti yang telah dijelaskan dalam definisi konsep bahwa pemberdayaan menurut Moh. Ali Aziz, dkk dalam buku Dakwah Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini

mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.³³

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional.³⁴ Sunyoto Usman dalam Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian.³⁵

³³ Moh. Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma AksiMetodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 169

³⁴ Randy R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2007), hlm. 75

³⁵ Abu Huraerah, *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2008), hlm. 87

Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai *resources* yang dimiliki.

Dalam pandangan Kartasasmita dalam Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat mengatakan bahwa memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

Sedangkan pemberdayaan menurut Islam lebih lanjut dikatakan oleh Amrullah Ahmad dalam Pengembangan Masyarakat Islam adalah sebuah sistem tindakan yang nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah *ummah* dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam.³⁶

Secara tegas al-Qur'an telah memberikan petunjuk tentang penempatan dakwah pemberdayaan masyarakat dalam kerangka-kerangka peran dan proses dalam surat al-Ahzab: 45-46

Artinya: Hai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. (Q.S. al-Ahzab: 45-46)

³⁶ Nanih Machendrawati, dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm. 29

Kedua ayat di atas mengisyaratkan sekurang-kurangnya lima peran dakwah:

Pertama: dakwah berperan sebagai *Syahidan*. Dakwah adalah saksi atau bukti ketinggian dan kebenaran ajaran Islam. Khususnya melalui keteladanan yang diperankan oleh pemeluknya.

Kedua: dakwah berperan sebagai *Mubasyiran*. Dakwah adalah fasilitas penggembira bagi mereka yang meyakini kebenarannya. Kita dapat saling memberi kabar gembira sekaligus saling memberikan inspirasi dan solusi dalam menghadapi berbagai masalah hidup.

Ketiga: dakwah berperan sebagai *Nadziran*, sejalan dengan perannya sebagai pemberi kabar gembira, dakwah juga berperan sebagai pemberi peringatan. Ia senantiasa berusaha mengingatkan para pengikut Islam untuk tetap konsisten dalam kebajikan dan keadilan sehingga tidak mudah terjebak dalam kesesatan.

Keempat: dakwah sebagai *Daa'iyah ila Allah*. Dakwah adalah panglima dalam memelihara keutuhan umat sekaligus membina kualitas umat sesuai dengan idealisasi peradaban yang dikehendakinya. Proses rekayasa sosial berlangsung dalam keteladanan kepribadian, sehingga ia senantiasa berlangsung dalam proses yang bersahaja, tidak berlebihan, dan kukuh dalam memegang prinsip pesan-pesan dakwah, yakni selalu mengisyaratkan panggilan spiritual untuk tetap menjadi manusia.

Kelima: dakwah berperan sebagai *Siraa'jan Munira*. Sebagai akumulasi dari peran-peran sebelumnya, dakwah memiliki peran

sebagai pemberi cahaya yang menerangi kegelapan sosial atau kegelapan spiritual. Ia menjadi penyejuk ketika umat menghadapi berbagai problema yang tidak pernah berhenti melilit kehidupan manusia.³⁷

Sondang P. Siagaan yang dikutip oleh Khoriddin dalam buku *Pembangunan Masyarakat* menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa tujuan:³⁸

- a. Keadilan social
- b. Kemakmuran merata
- c. Perlakuan yang sama di mata hukum
- d. Kesejahteraan material, mental, dan spiritual
- e. Kebahagiaan untuk sesame
- f. Ketenteraman dan keamanan

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat.

Paul A. Samuelson dikutip dari Monzer Kahf dalam *Ekonomi Islam*, ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.³⁹

³⁷ Asep Saiful Muhtadi dan Agus Ahmad Safe'i, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2003), hlm. 17-18

³⁸ Khoriddin, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 29

³⁹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*,

Ekonomi Islam adalah sebuah kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi dan konsumsi atau kenyataan dan permasalahan ekonomi yang dituntun oleh nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip syari'at Islam.⁴⁰

Definisi tersebut menekankan pada nilai-nilai islami dan bahwa ilmu ekonomi Islam membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial (*hablun min-an-nas*). Definisi ini memeberikan implikasi bahwa ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial Islam yang tidak terpisah dari dari nilai-nilai Islam lainnya (*hablun min Allah*). Pada definisi ini dengan jelas disebutkan bahwa ekonomi Islam harus bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Dengan demikian, bangunan ekonomi tidak terpisah dari ajaran Islam yang integral (*mutakamil*). Definisi ini juga mengandung suatu koreksian terhadap definisi ilmu ekonomi yang memisahkan antara kegiatan ekonomi dengan nilai-nilai moral.

4. Konsep Bank Sampah

a. Pengertian Bank Sampah

Secara istilah, Bank Sampah terdiri atas dua kata, yaitu kata Bank dan Sampah. Kata Bank berasal dari bahasa italia yaitu *banque* yang berarti tempat penukaran uang.⁴¹ Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 2

⁴⁰ Ibid., hlm.45

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 243

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberi jasa-jasa bank lainnya.⁴²

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian sampah ada banyak sekali referensi tentang sampah, diantaranya sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna.⁴³

Limbah atau dikenal sebagai sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga), yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah juga memberikan arti teknis yaitu sebagai bahan yang sudah tidak terpakai. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga), yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat

⁴² Abdul Rozak, *Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) dalam Pemberdayaan Perekonomian Nasabah*, (Jakarta: Fakultas Syaria'ah dan Hukum, 2014), hlm. 19

⁴³ Siswanto Hadi, *Kamus Pelopor Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: EGC, 2003), hlm. 114

tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis.

b) Tujuan dan Manfaat Bank Sampah

Tujuan dibangunnya Bank Sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia Tujuan bank sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.⁴⁴

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki.⁴⁵

Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga

⁴⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_sampah diakset 24/01/2021

⁴⁵ Bambang Wintoko, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemampuan Finansial, Cet. I*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), hlm, 65.

mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan. Tampaknya pemikiran seperti itu ditangkap oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga instansi pemerintah ini menargetkan membangun bank sampah di 250 kota diseluruh Indonesia.

Secara tidak langsung bank sampah berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Seperti yang diketahui ternyata sampah juga menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer, selain kegiatan manusia lainnya yang berhubungan dengan energi, kehutanan, pertanian, dan peternakan. Jika setiap satu ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas methana, maka bisa diketahui jumlah sumbangan sampah untuk pemanasan global sebesar 8.800 ton CH₄ per hari.⁴⁶

c) Landasan Hukum Bank Sampah

Pada tanggal 15 Oktober 2012, Pemerintah Republik Indonesia, mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang juga merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai.

⁴⁶ Ibid hlm.71

Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpulangkut-buang (end of pipe) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan reduce at source dan resource recycle melalui penerapan 3R.

Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.⁴⁷

d) Komponen Bank Sampah

Standar sistem kerja bank sampah merupakan standar minimal yang perlu dilengkapi pada setiap komponen yang terlibat dan ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan Bank Sampah. Seperti halnya dalam Bank Sampah terdapat penabung sampah atau nasabah Bank Sampah, pengelola/ pengurus bank sampah, dan pengepul.⁴⁸

1. Penabung sampah.

Penabung atau nasabah pada bank sampah merupakan anggota atau peserta yang berpartisipasi melakukan upaya pengurangan jumlah dan pemilah sampah rumah tangga masing-masing disertai kepemilikan akun rekening di buku tabungan sampah. Pada bank sampah terdapat partisipan

⁴⁷ Ahmad Thoriq Alfarisyi, Peran Pemberdayaan Bank Sampah Dalam Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya), *Alfarisyi Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6 No. 3, Surabaya: Universitas Airlangga, 2019, hlm.545

⁴⁸ <https://siangsa.com/standar-manajemen-dan-sistem-pemilahan-sampah-bank-sampah/> diakses pada tanggal 18/02/2021

transaksi didalamnya yaitu nasabah bank sampah. Menurut Djaslim Saladin menyatakan bahwa nasabah adalah orang atau badan yang memiliki rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Sedangkan menurut Komaruddin, nasabah merupakan seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank. Nasabah bank sampah adalah masyarakat menabung dalam bentuk sampah yang telah dikelompokkan sesuai jenisnya.⁴⁹

2. Pelaksana atau Pengurus Bank Sampah Pengelolaan Bank Sampah dilaksanakan secara sukarela maupun profesional. Struktur dan operator Bank Sampah yang sempurna terlihat pada perkembangan Bank Sampah, jadi antara Bank Sampah satu dengan lain bisa berbeda struktur kepengurusannya. Struktur minimal pengelola Bank Sampah terdiri dari lima orang yang yaitu kepala Bank Sampah, Sekretaris, Bendahara, seksi pengepakan dan seksi pemilahan.

3. Pengepul

Pembeli sampah atau pengepul merupakan komponen pembeli sampah dari pengelola bank sampah dipilih sesuai dengan ketentuan baik guna meningkatkan kualitas lingkungan

⁴⁹ Ekiv Intan Almaidah, dkk., *Tinjauan Terhadap Peran Bank Sampah Asri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Puhsarang Kabupaten Kediri*, Jurnal Qawanin, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 16

serta membangun hubungan kerjasama yang baik antara pengelola dengan pengepul.

e) Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi: pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir.⁵⁰

Tujuan dari pengelolaan sampah adalah *me-recovery* lebih banyak produk-produk yang bernilai yang berasal dari dalam sampah dengan menggunakan sedikit energi dan memberikan lebih banyak dampak positif terhadap lingkungan alam dan manusia, serta meningkatkan kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Selain itu pengelolaan sampah untuk mendukung efisiensi dan produktivitas ekonomi, membuka peluang lapangan pekerjaan serta sebagai sumber pendapatan ekonomi.⁵¹

Pengelolaan sampah dapat dilakukan dalam beberapa alternatif usaha, baik skala kecil maupun skala besar. Sampah yang dapat diproses pun sangat beragam, tergantung jenis dan penguraiannya. Banyak produk berbahan sampah dinilai

⁵⁰ Kuncoro Sejati, *Pengolahan Sampah Terpadu*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm.56

⁵¹ Novi Marlioni, *Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (Sampah Anorganik) Sebagai Bentuk Implementasi dari Pendidikan Lingkungan Hidup* dalam Jurnal Formatif Vol.4 No.2 2014

mempunyai kualitas cukup baik, terjamin aman, ramah terhadap lingkungan, dan memiliki harga bersaing di pasaran. Berbagai kalangan memberdayakan sampah sebagai bahan baku untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Sampah memang tidak seharusnya dibuang. Dengan sedikit kreatif dan kerja keras, sampah bisa disulap menjadi barang multifungsi dan kaya manfaat.

Dalam proses pengelolaan sampah, tahap distribusi mempunyai peranan penting. Lalu lintas sampah dimulai dari tingkat terendah, yaitu rumah tangga hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sebelum diolah, sampah menyusuri tiga alur pendistribusian yang saling berkaitan terlebih dahulu, yaitu penampungan, pengumpulan, dan pembuangan sampah.

Dalam proses pengelolaan sampah terpadu, ada lima tahap proses yang diterapkan, diantaranya penimbunan sampah, penimbunan tanah secara sehat, pembarakan sampah, penghancuran, dan pengomposan. Pola ini mengupayakan agar sampah tidak sampai terbentuk dengan menerapkan upaya cegah dan upaya pakai ulang. Upaya ini dilakukan pada tingkat terendah, yaitu pemakai barang. Jika terlanjur, pengelolaan daur ulang menjadi solusi.

Ada beberapa jenis pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat antara lain:

a) Pengelolaan sampah rumah tangga dengan sistem tradisional

Adalah sistem pengelolaan sampah yang banyak dilakukan oleh warga terutama di pedesaan, dimana sampah dikumpulkan, kemudian dilakukan pembuangan atau pemusnahan.

b) Pengelolaan sampah rumah tangga dengan sistem kumpul angkut buang.

Adalah sistem pengelolaan sampah dimana sampah yang dihasilkan dari rumah tangga.

c) Pengelolaan sampah dengan sistem mandiri dan produktif.

Adalah sistem pengelolaan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama mengelola sampah. Upaya-upaya pengelolaan sampah dengan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengelola sampah telah banyak dilakukan saat ini.

Ada tiga faktor sukses dalam *recycle*. Pertama, kemudahan dalam memperoleh sampah daur ulang dengan kualitas dan kuantitas memadai. Kedua, ketersediaan teknologi dari mulai pemilahan, pemisahan materi sasaran, dan pembuatan produk. Ketiga, kesadaran bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Bagi sebagian yang sulit di *reduce*, *refuse*, dan *recycle*, sampah harus dibuang sesuai tempat dan tahapannya. Banyak faktor menjadi bahan pertimbangan berhasilnya produk daur ulang,

diantaranya tingginya permintaan pasar akan produk, kemudahan memperoleh sampah daur ulang dengan jumlah dan kualitas yang memadai, ataupun pembuatan produk, serta adanya kesadaran dan keinginan untuk menjaga kelestarian lingkungan.⁵²

f) Bank Sampah Menurut Islam

Menurut Antonio prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur transaksi perbankan seperti, perniagaan atas barang yang haram, bunga, perjudian dan spekulasi yang disengaja (*maisir*), serta ketidak jelasan dan manipulatif (*gharar*). Sedangkan, Bank Sampah berbeda dari prinsip ini semua sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan menteri nomor 13 tahun 2012 bahwa sistem pendapatan Bank Sampah adalah dengan bagi hasil atau bisa disebut dengan mudharabah dan kesepakatan jual beli.⁵³ Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

⁵² Muh.Mansyur Syah Latuconsina, *Potensi Ekonomi Melalui Pengolahan Sampah dalam Perspektif Islam* dalam Jurnal Iqtisaduna Vol 3 No 2,2017, hlm 3-4.

⁵³ Ahmad Thoriq Alfarisyi, *Peran Pemberdayaan Bank Sampah Dalam Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya)*, Alfarisyi Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 3, Surabaya: Universitas Airlangga, 2019,hal.547

Jual beli barang daur ulang pada bank sampah ini diperbolehkan dalam Islam. Jual beli barang yang mengandung najis hukumnya haram kecuali dengan tujuan memanfaatkannya, bukan memakannya. Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri: “Diperbolehkan seseorang untuk menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan, pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api. Demikian pula, boleh menjual barang-barang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum seperti, minyak najis yang digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis. Semua barang sejenis tersebut boleh diperjualbelikan selagi ada manfaatnya dan bukan untuk dimakan dan diminum, walaupun barang tersebut najis.”⁵⁴

5. Kendala Dalam Peran Dan Pemberdayaan Masyarakat

a) Faktor Pendukung Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

1. Motivasi

Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, pengharapan dan penghormatan. Motivasi adalah sesuatu apa yang membuat seseorang bertindak.

2. Kebijakan Pemerintah

⁵⁴ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah jilid 12*, (Bandung: Al-Ma’arif, 2012), hlm.125

Kebijaksanaan–kebijaksanaan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui perundang-undangan, peraturan- peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri dan pejabat pemerintah, dan sebagainya adalah merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia.⁵⁵

b) Faktor Penghambat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

1. Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan maneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya sarana dan prasarana kegiatan masyarakat dalam pemberdayaan tersebut tidak terlepas dari rendahnya sumber daya manusia itu, hal ini karena masyarakat di desa sangatlah sederhana dan belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan keinginan masyarakat.⁵⁶

⁵⁵ Suhendra, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Alfabeta, 2006, hlm. 6

⁵⁶ Soekanto Soerdjono, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 10

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi sistematika penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam proposal tesis ini penulis telah melakukan kajian pustaka dengan melihat relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti, yang diantaranya sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1	Isrotul Muzdalifah	Pengelolaan Bank Smapah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pada Bank Sampah Tunas Bintang Pagi desa Rajekwesi Kec. Mayong Kab. Jepara). ⁵⁷	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pengelolaan sampah yang dilakukan Bank Sampah Tunas Bintang Pagi dengan melibatkan potensi nasabah (masyarakat) dalam pengelolaan sampah dan menjalankan program Bank Sampah tidak terlalu signifikan. Selain bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat, adanya Bank Sampah ini meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih.
2	Ragil Gunawan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dengan Memanfaatkan Sampah Rumah Tangga Melalui Kelompok Sadar Sampah “Sri Kandi” Di Desa Karantengah, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini pengorganisasian, pendamping dan kelompok sadar sampah melakukan perubahan paradigma serta dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui kegiatan yang direncanakan serta dijalankan oleh kelompok, seperti pendidikan pengelolaan sampah, praktek pembuatan kerajinan dari sampah plastik serta musyawarah untuk kesepakatan bersama warga RT

⁵⁷ Isrotul Muzdalifah, *Pengelolaan Bank Smapah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pada Bank Sampah Tunas Bintang Pagi desa Rajekwesi Kec. Mayong Kab. Jepara)*, Semarang: UIN Walisongo, 2019

		Purbalingga Jawa Tengah. ⁵⁸		19 agar tidak membuang sampah di sungai dan lahan-lahan milik warga hal ini bertujuan untuk saling mengawasi satu sama lain agar meminimalisir pembuangan sampah di sungai dan lahan milik warga.
3	Nurhasna	Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Di Kota Parepare. ⁵⁹	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manfaat Bank Sampah Peduli Labukkang, memiliki beberapa manfaat lagi bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan dan menjadikan sampah yang terbuang sia-sia memiliki nilai ekonomis sehingga dapat menambah ekonomi keluarga dan menambah silaturahmi antara masyarakat satu dengan yang lain.
4	Alfiano Arif Muhammad	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah di Perum Gumuk Indah, Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. ⁶⁰	Kualitatif	Hasil penelitian di dapat bahwa konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh warga Perum Gumuk Indah terkait Bank Sampah bisa dibagi dalam dua, yakni pertama, pengetahuan yang berarti pemberdayaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang baru terkait persoalan sampah dengan cara memberikan suatu ketrampilan dengan hasil daur ulang sampah.
5	Purwanto	Pengelolaan "Bank Sampah"	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada

⁵⁸ Ragil Gunawan, *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dengan Memanfaatkan Sampah Rumah Tangga Melalui Kelompok Sadar Sampah "Sri Kandi" Di Desa Karangtengah, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah*, Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Vo. 10 No.3 2017

⁵⁹ Nurhasna, *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Di Kota Parepare*, Parepare: STAIN Parepare, 2017

⁶⁰ Alfiano Arif Muhammad, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah di Perum Gumuk Indah, Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta*, Magister Ilmu Sains, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 10

		Berbasis Masyarakat sebagai Alternatif Meningkatkan Ekonomi Warga RT 004/RW 09, Cikarang Utara-Bekasi. ⁶¹		faktor-faktor yang mendorongnya yaitu faktor pemerintah, masyarakat dan swasta (pengusaha). Dukungan berasal dari masyarakat seperti tim penggerak PKK, kader lingkungan, warga masyarakat, pedagang lapak baik pabrik, pengepul barang bekas dan tukang rosok individu. Bank sampah telah memberikan manfaat kepada warga, terutama manfaat langsung dengan berkurangnya timbunan sampah, lingkungan menjadi lebih bersih dan asri, hijau, nyaman, sehat serta meningkatkan kemandirian warga secara ekonomi. Pengelolaan sampah terintegrasi dapat menstimulasi kreativitas dan inovasi masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan warga.
6	Roza Linda	Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Bank Sampah Berlian Kelurahan Tangkerang Labuai). ⁶²	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan daur ulang sampah plastik di Bank Sampah Berlian berjalan cukup baik. Kegiatan daur ulang sampah plastik di Bank Sampah Berlian telah memberikan manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat dan anggotanya antara lain manfaat yang dirasakan oleh masyarakat selain manfaat sosial juga manfaat ekonomi. Kegiatan ini juga memberikan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana

⁶¹ Purwanto, *Pengelolaan "Bank Sampah" Berbasis Masyarakat sebagai Alternatif Meningkatkan Ekonomi Warga RT 004/RW 09, Cikarang Utara-Bekasi*, *Academics in Action Journal* Volume, Number 1, 27-37, 2018

⁶² Roza Linda, *Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Bank Sampah Berlian Kelurahan Tangkerang Labuai)*, *Jurnal Al-Istiqna*, Edisi 12 Volume I, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016

				mengolah sampah dengan baik.
7	Anih Sri Suryani	Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (studi kasus Bank Sampah Malang). ⁶³	Kualitatif	Hasil penelitian di dapat bahwa program pengelolaan sampah mandiri melalui Bank Sampah, telah menjadi salah satu alternative solusi bagi pemerintah dan masyarakat. Solusi untuk mengurangi peningkatan volume sampah yang semakin tidak terkendali. BSM dapat berperan sebagai dropping point bagi produsen untuk produk dan kemasan produk yang masa pakainya telah usai. Dengan menerapkan pola ini, volume sampah yang dibuang ke TPA diharapkan dapat berkurang. Penerapan prinsip 3R sedekat mungkin dengan sumber sampah juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah sampah secara terintegrasi dan menyeluruh, sehingga tujuan akhir kebijakan pengelolaan sampah Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.
8	Azelia Deskasari	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program bank sampah Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. ⁶⁴	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui program menabung sampah, sosialisasi, dan pelatihan ketrampilan tentang pengolaan sampah. Faktor-faktor yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu adanya respon positif dari masyarakat menyambut hadirnya Program bank sampah. Adanya dukungan dari pihak nasababh dan pihak eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan

⁶³ Anih Sri Suryani, *Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah*, Jurnal Penelitian, Vol. 5, No. 10, 2014

⁶⁴ Azelia Deskasari, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Sampah Bangkitku Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019

				di Program bank sampah. Dan faktor yang menghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas, terkendalanya oleh kesibukann masing-masing nasabah, belum adanya bantuan sarana dan prasarana dari kelurahan untuk kegiatan di Program bank sampah.
9	Agung Winarno	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Organik Di Desa Krejengan Probolinggo. ⁶⁵	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui pengadaan dan pemantapan pengelolaan manajemen bank sampah organik Desa Krejengan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dimulai dengan kegiatan sosialisasi kampanye pegolahan sampah organik yang bekerjasama dengan BPP (Badan Penyuluhan Pertanian). Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sampah khususnya sampah organik, selanjutnya masyarakat diedukasi dan diajak mempraktekkan cara pengelolaan sampah organik dengan benar yang terdiri dari beberapa macam diantaranya, sampah daun, limbah rumah tangga, dan kotoran ternak yang nantinya akan di kelola untuk menghasilkan pupuk dan pakan ternak.
10	Ahmad Thoriq Alfarisyi	Peran Pemberdayaan Bank Sampah Dalam Islam (Studi Kasus Pada Bank	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah Dengan adanya Bank Sampah Induk Surabaya, masyarakat menjadi sadar bahwa sampah yang selama ini dianggap tidak berguna keberadaannya, sebenarnya dapat membawa sebuah kesejahteraan ekonomi

⁶⁵ Agung Winarno, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Organik Di Desa Krejengan Probolinggo*, Jurnal Graha Pengabdian (E- ISSN: 2715-5714) Vol. 1, Malang: UIN Malang, 2019, hlm.63-70

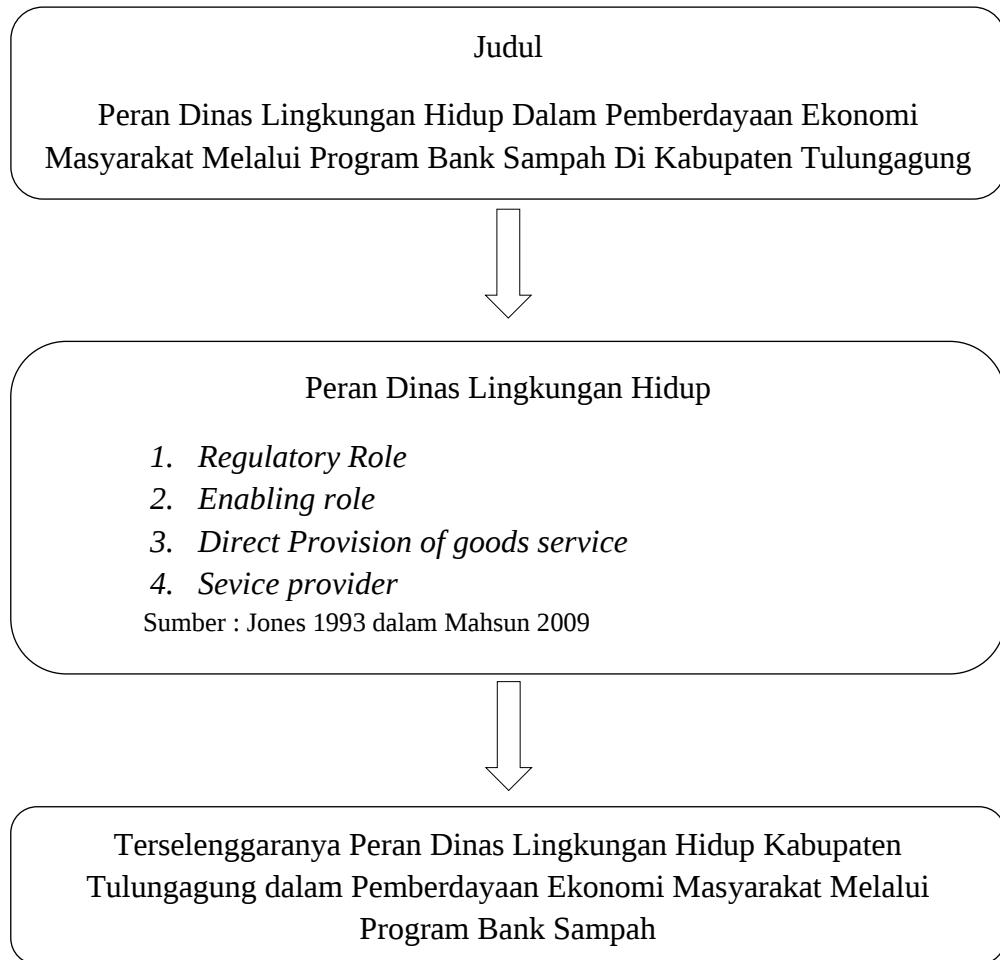
		Sampah Induk Surabaya). ⁶⁶		bagi masyarakat. Nilai rupiah yang didapat dari sampah tersebut dapat disimpan atau ditabung oleh nasabahnya. Pemberdayaan dalam konsep islam masuk dalam tamkin. Tamkin sendiri menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu, kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh dan memiliki kedudukan atau tempat. Baik itu bersifat hissi (dapat dirasakan/materi) seperti menetapnya burung pada sangkarnya atau bersifat ma'nawi seperti kokohnya atau teguhnya orang tersebut di sisi penguasa.
--	--	---------------------------------------	--	---

Secara garis besar penelitian terdahulu yang penulis tulis menjelaskan tentang manajemen bank sampah dalam pemberdayaan ekonomi nasabah, dampak bank sampah terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, dan pengelolaan sampah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengetahui apakah dinas terkait dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program bank sampah.

⁶⁶ Ahmad Thoriq Alfarisyi, *Peran Pemberdayaan Bank Sampah Dalam Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya)*, Alfarisyi Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 3, Surabaya: Universitas Airlangga, 2019, hlm. 541-554

C. Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam penelitian ini lebih fokus terhadap Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Peran DLH dalam membantu perekonomian masyarakat melalui program bank sampah. ini diharapkan bisa menjadi alternatif dan bisa untuk menanggulangi kemiskinan di kabupaten Tulungagung.